

**MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN GRATIS
DI MTs MUHAMMADIYAH 1 PURBALINGGA**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Pendidikan

**SODIKIN
1423402124**

**PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari pembiayaan. Dan pembiayaan tentu saja terkait erat dengan masalah keuangan. Dalam prosesnya, pendidikan sangat membutuhkan dukungan dana untuk menjalankan roda organisasi.

Pada kenyataannya, ada berbagai macam kebutuhan pendidikan yang harus didukung dengan pembiayaan. Dan pembiayaan ini bersifat langsung atau *direct cost*. Disebut demikian karena bersinggungan langsung dengan berbagai proses yang ada di sekolah/madrasah. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan sebut saja untuk membiayai pelaksanaan pembelajaran, sarana belajar, pemeliharaan sarana, gaji atau kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, ketatausahaan/administrasi, dan pembinaan teknis edukatif.¹ Kesemua itu jika dikelompokkan maka disebut dengan biaya investasi, operasional dan personal.²

Dikarenakan tidak dapat dipisahkannya pendidikan dan pendanaan maka Ismaya menyebut bahwa keuangan termasuk salah satu unsur penting dalam pengelolaan sekolah/madrasah.³ Dalam pandangannya, untuk dapat mencetak anak didik yang baik diperlukan keuangan yang baik. Oleh karena itu, adalah hal yang “aneh” ketika sekolah/madrasah menggratiskan biaya pendidikan bagi peserta didiknya. Tidak berbeda dengan Ismaya, Matin juga menyebutkan bahwa biaya merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan.⁴

¹ Rusdiana, *Pengelolaan Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 222-223.

² Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang: Standar Biaya, pasal 62 ayat (1)

³ Bambang Ismaya, *Pengelolaan Pendidikan*, (Bandung: Refika Additama, 2015), 135.

⁴ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 1.

Ada keterkaitan antara keuangan di sebuah lembaga pendidikan dengan mutu pendidikan. Suhardan dkk menegaskan bahwa biaya pendidikan mempunyai peranan yang besar terhadap mutu atau kualitas pendidikan.⁵ Dengan kata lain, kualitas pendidikan di sekolah/madrasah tidak dapat dipisahkan dengan pendanaan yang baik. Agar dapat mencapai kualitas pendidikan yang tinggi, keuangan yang dimiliki harus dapat memenuhi kebutuhannya. Sehingga secara lugas dapat disebutkan bahwa pendidikan sangatlah membutuhkan dana. Dan oleh karena itu pendidikan tidak semestinya digratiskan.

Perlu diketahui juga bahwa pendanaan pendidikan menurut Uwes dan Rusdiana merupakan bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat. Pendidikan tentu saja tidak dapat menafikan partisipasi masyarakat tersebut. Ada lima bentuk partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Kelima hal tersebut adalah finansial (keuangan), material, akademik, kultural, dan evaluatif.⁶

Dari kelima bentuk partisipasi tersebut dua yang pertama sangat berkaitan dengan pendanaan pendidikan. Dalam partisipasi finansial, masyarakat atau orang tua dapat memberikan dukungan terhadap pendidikan dalam bentuk dukungan dana yang diperlukan. Sedangkan partisipasi material, bentuk dukungannya berupa material bangunan untuk penyempurnaan bangunan ruang dan tempat kegiatan belajar mengajar serta material lain yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran.

Keuangan pendidikan yang diperoleh dari biaya pendidikan merupakan *instrumental input* yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa hal ini sangat berkaitan erat dengan upaya atau usaha pencapaian tujuan pendidikan. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, biaya pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan. Penyelenggaraan pendidikan tidak dapat mengabaikan peranan dana. Hal ini

⁵ Dadang Suhardan, et.al., *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 63.

⁶ Sanusi Uwais dan H.A.Rusdiana, *Sistem Pemikiran Manajemen Pendidikan: Alternatif Memecahkan Masalah Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 245.

diakui oleh Supriadi bahwa tanpa biaya proses pendidikan tidak akan dapat berjalan.⁷

Ada berbagai sumber pendanaan yang dapat digali untuk keberlangsungan pendidikan. Bagi sekolah/madrasah negeri, sumber pendanaan berasal dari pemerintah yang umumnya terdiri dari dana rutin, seperti gaji, biaya operasional sekolah/madrasah dan perawatan fasilitas (OPF). Dan bagi sekolah swasta, sumber dana selain dari bantuan pemerintah dapat juga berasal dari masyarakat, baik berasal dari orang tua/wali peserta didik maupun dari masyarakat luas termasuk dunia usaha dan dunia industri (DU/DI).⁸ Menurut Fatah, sumber-sumber keuangan sekolah baik negeri ataupun swasta adalah orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dunia usaha dan alumni.⁹

Jika mendasarkan pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah pasal 10 ayat (2) maka sesungguhnya dibolehkan melakukan penggalangan dana dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan dari orang tua/wali peserta didik.¹⁰ Artinya tidak ada larangan jika sekolah memungut dana dari orang tua. Dan bila hal itu dilakukan maka bisa dipastikan bukanlah tindakan melanggar hukum.

Dana atau keuangan sekolah/madrasah yang berhasil dihimpun semestinya dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan yang baik akan memberikan dampak yang baik pula kepada jalannya organisasi sekolah/madrasah. Sebaliknya, pengelolaan yang salah akan memberikan dampak yang buruk terhadapnya.

Agar pengelolaan keuangan di sekolah/madrasah dapat berjalan dengan baik, fungsi-fungsi manajemen perlu diperhatikan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut menurut George R. Terry meliputi *planning, organizing, actuating,*

⁷ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar Dan Menengah*, cet. V, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 3.

⁸ Akdon, et.al., *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 86.

⁹ Nanang Fatah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 43.

¹⁰ Lihat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 48 Tahun 2008 Tentang: Pendanaan Pendidikan Pasal 59 ayat (2).

controlling.¹¹ Dalam penerapannya maka sekolah/madrasah hendaknya melakukan perencanaan anggaran, memilih strategi yang tepat dalam mencari sumber dana, memperhatikan dengan seksama penggunaan keuangan sekolah/madrasah sehingga didapatkan efektivitas dan efisiensi, melakukan pengawasan dan evaluasi anggaran untuk menghindari penyelewengan, dan menyampaikan pertanggung jawaban kepada pihak terkait.

Mengacu pada teori manajemen keuangan yang menyebutkan bahwa apabila terjadi kegagalan dalam pendanaan atau dalam memperoleh dana maka perusahaan akan mengalami hambatan dalam melakukan kegiatan produksi. Akibatnya kegiatan produksi tidak berjalan dengan lancar.¹² Demikian juga dengan manajemen keuangan sekolah/madrasah, tidak boleh terjadi kesalahan dan kegagalan. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan kegagalan dalam memperoleh dana. Jika terjadi kesalahan dan kegagalan tersebut maka organisasi sekolah/madrasah akan mengalami hambatan dalam kegiatan operasionalnya, kegiatan pembelajaran menjadi tersendat dan tujuan pendidikan menjadi gagal diraih.

Manajemen keuangan yang baik memperhatikan efisiensi dalam penggunaan dana. Maksudnya adalah dengan menggunakan dana seminimal mungkin, tetapi mampu menghasilkan laba yang sebanyak-banyaknya. Jika diterapkan di sekolah/madrasah maka dengan pendanaan yang minimal diperoleh kuantitas dan kualitas pendidikan yang baik. Kuantitas pendidikan dimaksudkan dengan semakin bertambahnya jumlah peserta didik. Dan kualitas pendidikan dimaksudkan dengan meningkatnya prestasi akademik maupun non akademik. Dan tidak kalah penting adalah berkualitasnya sarana dan prasarana pendukung pendidikan. Kualitas ini dapat juga dilihat dari hasil akreditasinya.

Pengelolaan keuangan sekolah/madrasah yang memperhatikan prinsip efisiensi memberikan dampak yang signifikan terhadap terbukanya kesempatan bersekolah terhadap anak-anak lulusan MI/SD dari keluarga tidak mampu.

¹¹ Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, cet. II, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 21.

¹² Musthafa, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), 3.

Perlu diketahui bahwa di Tahun Pelajaran 2017/2018 Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) tingkat MI/SD di Kabupaten Purbalingga mencapai 700 orang. Jumlah tersebut sangatlah besar dan setara dengan jumlah peserta didik satu sekolah kelas VII hingga kelas IX.¹³ Angka tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak anak yang tidak bersekolah meskipun telah ada program wajib belajar pendidikan dasar (wajib dikdas) 9 tahun.

Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 47 Tahun 2008 Tentang: Wajib Belajar pasal 12 bahwa setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar wajib mengikuti program wajib belajar. Dan terhadap orang tua yang mempunyai anak usia 7 – 15 tahun dan mengabaikannya maka Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk memberikan sanksi administratif (pasal 7 ayat (6)).¹⁴

Ada berbagai sebab yang melatarbelakangi mereka tidak bersekolah. Salah satu diantaranya adalah kondisi ekonomi atau keuangan orang tua.¹⁵ Sesungguhnya ada enam faktor yang melatarbelakangi banyaknya putus sekolah. Dan Faktor ekonomi ini menduduki nomer urut pertama.

Ketidakmampuan orang tua menjadi salah satu alasan mereka tidak bersekolah. Kondisi ini harus ada solusi agar mereka tetap bisa bersekolah bagaimanapun keadaan yang ada. Negara, masyarakat dan sekolah/madrasah sudah semestinya mempunyai jalan keluar terhadap masalah AUSTS ini.

Melalui berbagai bentuk, pemerintah telah memberikan bantuan. Diantaranya adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP). Apa yang dilakukan pemerintah telah sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) dan (2).¹⁶ Dalam kedua pasal tersebut dinyatakan bahwa: (1) Setiap warga negara berhak

¹³ Disarikan dari pidato Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga tanggal 28 Agustus 2017.

¹⁴ PP no: 47 Tahun 2008 Tentang: Wajib Belajar, pasal 7 ayat (6) dan pasal 12 ayat (1 dan 2).

¹⁵ Ni Ayu Krisna Dewi et.al., “Analisis Faktor-faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Usia Pendidikan Dasar Di Kecamatan Gerokgak Tahun 2012/2013”, Online Journal *E-Journal.Undiksha*, 4, No. 1 (2014), (diakses 1 September 2018)

¹⁶ Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat (1) dan (2).

mendapatkan pendidikan, dan (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Dinyatakan dalam UU Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia pasal 12 bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Bahkan secara eksplisit dinyatakan dalam pasal 60 ayat (1) bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan kecerdasannya.¹⁷

Meski pemerintah telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan bantuan pendidikan, faktanya masih banyak anak usia wajib belajar yang tidak bersekolah. Diperlukan usaha semua pihak untuk mendorong agar semua lulusan MI/SD melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu MTs/SMP. Madrasah/sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tak terkecuali untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi lulusan MI/SD tersebut melanjutkan pendidikannya.

Adalah MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga yang membuka pintu kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan atau menyelesaikan jenjang pendidikan dasar 9 tahun. Program yang dilakukan adalah pendidikan gratis alias tidak memungut biaya sepeserpun. Bahkan calon peserta didik memperoleh bahan pakaian seragam dengan cuma-cuma atau gratis.

MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga termasuk salah satu madrasah yang berprestasi, paling tidak jika dilihat dari prestasi non akademik dan hasil akreditasinya. Dalam masa akreditasi terakhir (tahun 2016) MTs ini mendapatkan nilai kumulatif 88 (Amat Baik). Hal ini ditunjang dengan sarana prasarana berupa gedung yang sangat representatif. Fasilitas belajar lain seperti laboratotium dan perpustakaan juga sangat memadai. Kesejahteraan guru-guru pengabdian (non pns) juga terpenuhi dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari gaji mereka yang mendekati upah minimum kabupaten (UMK). Bahkan perbandingan jumlah peserta didik antara sebelum dan sesudah kebijakan

¹⁷ Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999: Tentang Hak Asasi pasal 12 dan pasal 60 ayat (1).

pendidikan gratis sangatlah jauh. Peningkatan jumlah peserta didik sangat signifikan.

Kondisi di MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga, dimana kuantitas dan kualitas pendidikan berjalan beriringan tidak terlepas dari beberapa faktor. Di antara faktor tersebut adalah diterapkannya manajemen keuangan dengan baik dan memperhatikan berbagai prinsip yang ada, terutama prinsip efisiensi.

Kondisi yang tergambar dengan jelas dalam paparan di atas, menyebabkan peneliti tergelitik untuk meneliti manajemen keuangan di MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga yang menerapkan program pendidikan gratis karena: (1) setelah diterapkannya manajemen keuangan dan dilaksanakannya prinsip-prinsipnya dengan baik, terlebih prinsip efisiensi anggaran maka memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan program pendidikan gratis, (2) hasil penelitian sangat penting bagi terbukanya wawasan dan kesempatan seluas-luasnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, (3) masalah di atas belum pernah diteliti, baik oleh kalangan internal maupun eksternal madrasah, (4) hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemerataan pendidikan dan suksesnya program wajib belajar pendidikan dasar (wajib dikdas) 9 atau 12 tahun.

Atas dasar itulah peneliti tertarik untuk meneliti manajemen keuangan di MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga yang menerapkan program pendidikan gratis dengan judul penelitian "*Manajemen Keuangan Pendidikan Gratis di MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga*"

B. Fokus Penelitian

Setiap penelitian yang baik pasti mengarah dan fokus pada persoalan utama. Demikian juga penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian ini fokus pada persoalan utama yaitu implemetasi manajemen keuangan di MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga yang menerapkan program pendidikan gratis.

Sedangkan pemilihan lokasi penelitian yaitu MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga dikarenakan tiga alasan: (1) MTs tersebut merupakan satu-satunya sekolah/madrasah swasta yang menerapkan program pendidikan gratis di

Purbalingga. (2) Meski gratis atau tidak memugut biaya dari orang tua/wali peserta didik, nyatanya MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga mempunyai prestasi dan mutu yang baik. Dan (3) lokasinya yang sangat mudah dijangkau karena tepat berada di jantung kota purbalingga sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas ada beberapa permasalahan penelitian. Namun, tidak semua masalah yang telah ditemukan dan terkait dengan judul penelitian sebagaimana yang tercantum dalam sub bab sebelumnya akan diteliti. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa keterbatasan yaitu: waktu, dana, kemampuan peneliti, dan kelayakan masalah untuk diteliti.

Dalam tesis ini masalah yang akan diteliti adalah implementasi manajemen keuangan pendidikan gratis di MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga. Sehingga berdasarkan permasalahan yang telah ditentukan, rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

Bagaimana implementasi manajemen keuangan pendidikan gratis di MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga?

Dan dari rumusan masalah tersebut ada beberapa sub masalah terkait dengan implementasi manajemen keuangan, yaitu:

1. Bagaimana perencanaan anggaran di MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga?
2. Bagaimana strategi menggali dana di MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga?
3. Bagaimana penggunaan atau pembelanjaan keuangan di MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga?
4. Bagaimana pengawasan penggunaan atau pembelanjaan keuangan di MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga?
5. Dan bagaimana pertanggungjawaban penggunaan atau pembelanjaan keuangan di MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga?

D. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi manajemen keuangan pendidikan gratis di MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga.
2. Untuk mendeskripsikan perencanaan anggaran di MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga
3. Untuk mendeskripsikan strategi menggali dana di MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga.
4. Untuk mendeskripsikan penggunaan atau pembelanjaan keuangan di MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga.
5. Untuk mendeskripsikan pengawasan penggunaan atau pembelanjaan keuangan di MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga
6. Untuk mendeskripsikan pertanggungjawaban penggunaan atau pembelanjaan keuangan di MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa masukan, saran, dan kontribusi positif konstruktif bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah pengetahuan dan menjadi bahan kajian tentang manajemen keuangan pendidikan gratis
 - b. Menjadi referensi dan batu pijakan bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti unsur-unsur lain dalam manajemen keuangan pendidikan gratis selain yang telah diteliti dalam penelitian ini.
2. Manfaat Secara Praktis
 - a. Bagi Sekolah/Madrasah
 - 1) Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu upaya dalam

peningkatan kualitas manajemen keuangan sekolah/madrasah terutama bagi sekolah/madrasah yang ingin menerapkan pendidikan gratis

- 2) Memberikan kontribusi dalam bentuk informasi tambahan tentang manajemen keuangan pendidikan gratis.

b. Bagi Kepala Sekolah/Madrasah dan stakeholder

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan rekomendasi bagi kepala sekolah/madrasah dan stakeholder lainnya yang berkeinginan membangun manajemen keuangan pendidikan gratis.

c. Untuk Peneliti

- 1) Menambah pengetahuan dan wawasan tentang manajemen keuangan, khususnya manajemen keuangan pendidikan gratis.
- 2) Memenuhi salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk mendapatkan gelar Magister Pendidikan (M.Pd.)

F. Sistematika Penulisan

Penelitian dalam tesis ini dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab disusun secara sistematis dan rinci. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan tentang beberapa teori yang mengungkapkan pentingnya manajemen keuangan yang berkorelasi positif terhadap kualitas pendidikan. Dipaparkan juga masih banyaknya anak usia sekolah tidak sekolah (AUSTS) di Kabupaten Purbalinga. Juga diungkapkan tentang MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga yang menggratiskan biaya pendidikan secara keseluruhan kepada peserta didik. Di samping itu, dalam bab pertama juga dipaparkan fokus penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Kesemua itu digunakan untuk menguatkan posisi penelitian peneliti agar tidak sama dengan atau

dikategorikan sebagai plagiasi karya orang lain. Definisi istilah dikemukakan untuk menyamakan persepsi dan menghindari adanya perbedaan pemahaman terhadap istilah dalam penelitian. Sedangkan sistematika penulisan sebagai kerangka dalam menyusun dan mengkaji tesis ini.

Bab kedua berupa kajian teoritik. Bab ini merupakan uraian deskripsi konseptual penelitian yang didasarkan pada berbagai literatur dan beberapa teori ahli yang relevan dengan judul penelitian. Deskripsi konseptual penelitian berfungsi memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai pijakan pembahasan hasil penelitian. Kecuali itu, kajian teoritik digunakan untuk memandu peneliti agar fokus penelitiannya sesuai dengan realitas lapangan. Bab ini membahas tentang manajemen keuangan pendidikan gratis, yang meliputi: pengertian manajemen keuangan, sumber-sumber pendapatan sekolah/madrasah, merencanakan anggaran sekolah/madrasah, membelanjakan keuangan sekolah/madrasah, pengawasan pengelolaan keuangan sekolah/madrasah dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah di MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga.

Bab ketiga berisi metode penelitian. Bab ini berisi tentang tempat dan waktu penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Adapun bab keempat merupakan paparan data dan temuan penelitian serta pembahasan. Dalam bab ini dibahas: (1) paparan jawaban sistematis terhadap rumusan masalah dari hasil temuan dalam penelitian yang mencakup gambaran umum MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga; landasan kebijakan pendidikan gratis, proses manajemen keuangan pendidikan gratis: sumber-sumber pendapatan sekolah, perencanaan anggaran sekolah, pembelanjaan keuangan sekolah, pengawasan pengelolaan keuangan sekolah dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah di MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga, dampak kebijakan pendidikan gratis: dampak terhadap mutu; kuantitas peserta didik; kesejahteraan guru; sarana dan prasarana. Dan (2) pembahasan. Sub bab ini merupakan pembahasan hasil penelitian dan

digunakan untuk mengklasifikasikan dan memposisikan hasil temuan yang telah dirumuskan dalam bab pertama. Selanjutnya peneliti merelevansikannya dengan teori-teori yang di bahas dalam bab kedua dan metodologi penelitian yang telah dikaji secara sistematis pada bab ketiga. Keseluruhannya dipaparkan pada pembahasan sekaligus hasil penelitian didiskusikan dengan kajian teori.

Dan bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi dan saran yang berkaitan dengan masalah-masalah aktual dari temuan penelitian yang telah dikemukakan pada bab terdahulu. Saran-saran atau rekomendasi yang diajukan dapat dijadikan sebagai bahan wacana, renungan atau bahkan kajian penelitian selanjutnya dan alternatif solusi pada berbagai permasalahan lainnya.



IAIN PURWOKERTO

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Agar bisa memberikan gambaran ringkas namun jelas dari sebuah penelitian maka diperlukan adanya kesimpulan hasil penelitian itu sendiri. Begitupun dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan. Berdasarkan pada pemaparan dan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya maka penelitian yang berjudul *Manajemen Keuangan Pendidikan Gratis Di MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan manajemen keuangan pendidikan gratis di MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga telah menunjukkan tata kelola keuangan yang sesuai dengan sistem manajemen keuangan.
 - a. Sistem tersebut dimulai dengan perencanaan anggaran, strategi mencari sumber dana sekolah/madrasah, penggunaan atau pembelanjaan keuangan sekolah/madrasah, pengawasan dan evaluasi anggaran, dan pertanggung jawaban keuangan.
 - b. Melakukan pencatatan-pencatatan setiap transaksi baik keluar ataupun masuk. Pencatatan setiap transaksi tersebut dalam bentuk pembukuan yang mengikuti kaidah pembukuan.
 - c. Penggunaan anggaran madrasah, baik yang berasal dari pemerintah atau sumber lain telah mengacu pada rencana kegiatan dan anggaran madrasah (RKAM).
2. Perencanaan anggaran di MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga dilakukan dengan mengikuti alur:
 - a. Melakukan pembentukan Tim Pengembang Madrasah,
 - b. Program dan kegiatan yang disusun sudah sangat operasional,
 - c. Program dan kegiatannya berdasarkan kondisi riil yang ada,
 - d. Melakukan analisis konteks,
 - e. Menentukan skala prioritas,

- f. Dan menentukan rencana kegiatan, menentukan rencana pembiayaan, menentukan waktu pelaksanaan.
 - g. Perencanaan di MTs Muhammadiyah 1 disusun dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM),
 - h. Penyusunan RKAM tersebut dilakukan oleh Tim Pengembang yang sebelumnya telah mendengarkan berbagai aspirasi baik dari guru, karyawan, dan orang tua atau wali.
3. MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga menerapkan strategi *out of the box* dalam mencari sumber dana. Artinya, dalam menggali sumber dana digunakan cara-cara yang tidak biasa. Strategi tersebut berupa:
- a. Memperbanyak peserta didik. Artinya semakin banyak jumlah peserta didik maka akan semakin banyak pula pemasukan dari sumber Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sehingga dari BOS sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional madrasah,
 - b. Memanfaatkan momentum kelulusan sekolah/madrasah setingkat di atasnya. Dalam mencari peserta didik, sekolah/madrasah tingkat atas senantiasa meminta bantuan guru atau wali kelas 9 untuk mengarahkan peserta didiknya ke sekolah/madrasah tersebut dengan imbalan sejumlah uang. Jika di sekolah/madrasah lain lebih bersifat individu sehingga fee yang diberikan kemudian masuk kantong pribadi. Sementara MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga tidak demikian. Pengarahan peserta didik untuk mendaftar ke sekolah/madrasah tertentu yang memberikan imbalan dilakukan atas nama madrasah dan bukan personal. Sehingga imbalan sejumlah uang akan diterima akan masuk ke dalam kas madrasah.
 - c. Mengumpulkan diskon dan fee dari setiap transaksi. Dalam transaksi tertentu biasanya ada fee dari seller atau penjual untuk kepala ataupun guru yang melakukan transaksi. Semua dana-dana tersebut harus dimasukkan ke dalam madrasah.
 - d. Menggali ZIS. Setiap guru dan karyawan telah memiliki kesadaran untuk membersihkan harta yang diterimanya dengan mengeluarkan

sebagian dalam bentuk zakat, infaq dan shadaqah. Maka semangat ini dimanfaatkan oleh Madrasah dengan meminta ZIS guru dan karyawan untuk diserahkan kepada madrasah melalui bendahara. Dana yang terkumpul akan dimanfaatkan untuk kepentingan madrasah dan peserta didik.

4. Penggunaan anggaran di MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga mengacu kepada RKAM dengan menerapkan prinsip efisiensi. Penerapan prinsip efisiensi ini memungkinkan madrasah mendapatkan kelebihan dana yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan peserta didik di tahun pelajaran berikutnya. Untuk tahun pelajaran 2017/2018, MTs Muhammadiyah 1 dapat melakukan efisiensi anggaran sebesar 8.937.800 dari total anggaran 1.007.895.000. Meskipun terjadi efisiensi hanya berkisar 1%, tetapi hal itu sudah merupakan langkah yang baik.
5. Pengawasan dalam penggunaan anggaran madrasah dilakukan oleh kepala madrasah. Setiap bulan bendahara harus melaporkan pembukuannya untuk diperiksa oleh kepala. Jika tidak ditemukan kesalahan maka kemudian ditandatangani oleh Kepala Madrasah.

Pengawasan juga dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Namun pengawasannya lebih ditujukan kepada penggunaan dana BOS.

6. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilakukan MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga disusun dalam dua macam, yaitu laporan penggunaan dana yang bersumber dari BOS dan non BOS.

Untuk penggunaan dana BOS, laporan disusun per semester. Artinya, dalam satu tahun laporan penggunaan BOS dilakukan dua kali.

Sedangkan dana selain BOS, khususnya dana yang bersumber dari pemerintah untuk pengembangan sarana dan prasarana, laporan dibuat berdasarkan ketentuan yaitu maksimal satu bulan setelah proyek selesai dikerjakan.

7. Dalam menerapkan manajemen keuangan, MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga menerapkan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi,

dan akuntabilitas sebagaimana amanat pasal 59 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan juga prinsip efektifitas.

Prinsip keadilan dilakukan dalam bentuk tidak membedakan latar belakang apapun dalam memberikan layanan pendidikan. Prinsip efisiensi dilakukan dengan cara berusaha mendapatkan hasil yang maksimal meskipun dengan sumber dana yang terbatas. Prinsip transparansi dilakukan dalam bentuk membuka diri kepada siapapun untuk mengakses pengelolaan keuangan, termasuk untuk obyek penelitian. Prinsip akuntabilitas dilakukan dalam bentuk bersedia diaudit dan diawasi serta memberikan laporan penggunaan dana pendidikan. Dan prinsip efektivitas juga telah dilakukan karena dalam pengelolaan keuangan karena setiap dana yang dikeluarkan adalah untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga dan menciptakan *outcomes* yang bermutu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

B. Saran

Setelah memperhatikan dengan cermat hasil penelitian dan juga kesimpulan yang ada, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga melalui petugas yang ditunjuk untuk selalu memberikan pengendalian (*controlling*), pengawasan (*supervision*), dan bimbingan (*education*), terkait dengan perencanaan, pembelanjaan, dan pembukuan terhadap keuangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah.

Sumber keuangan rutin maupun insidental perlu terus mendapatkan kontrol dan pengawasan secara berkesinambungan. Hal ini perlu dilakukan agar madrasah dapat menghindari kesalahan dalam menggunakan dan melaporkan keuangan. Hal ini juga untuk menjaga agar pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Manajemen keuangan madrasah yang sudah berjalan baik dan memberikan dampak positif bagi peserta didik, guru, madrasah dan dunia pendidikan

pada umumnya harus terus ditingkatkan. Pengelolaannya harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam mengelola keuangan perlu terus mengutamakan sifat-sifat kenabian, yaitu: sidik, amanah, tabligh, dan fathanah.
4. Dalam rangka membangun *public trust*, MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga perlu lebih meningkatkan transparansi dengan memberikan informasi terbuka melalui website atau media lain yang lebih mudah diakses publik. Sehingga hal tersebut akan membangun kepercayaan untuk memberikan donasi dalam rangka pelayanan pendidikan gratis.
5. Dalam rangka lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi bendahara, perlu kiranya MTs Muhammadiyah 1 Purbalingga mengangkat tenaga profesional. Sehingga tidak lagi jabatan bendahara hanya sebagai tugas tambahan di samping tugas utama sebagai guru.

C. Kata Penutup

Syukur *al-hamdu lillāh* kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, karunia dan anugerah yang diberikan kepada penulis. Berkat riḍo dan perkenanya penelitian yang penulis lakukan akhirnya dapat diselesaikan.

Penulis menyadari penuh bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna baik tata penulisan maupun konten. Demi perbaikan dan penyempurnaan hasil karya tesis ini, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran konstruktif dari pembaca. Penulis juga berharap, semoga hasil sederhana ini memberikan manfaat bagi lembaga pendidikan Islam lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon, et.al.. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015)
- al-Hasyimi, Ahmad. *Mukhtārul Aḥādīs wal Hikamil Muḥammadiyah*. (Semarang: Toha Putra, t.t)
- aṭ-Ṭabrani, Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad. *al-Mu'jamul Ausaṭ*. (Kairo: Dārul Haramain, 1415 H)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Asfila, Murniati AR, dan Nasir Usman. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam meningkatkan Mutu Pendidikan pada MTs Janarata, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Aceh". *Jurnal Administrasi Pendidikan* 3, no. 4 (2015): 125-126
- Bogdan, Robert C., and Biklen, Sari Knopp,: *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Fifth Edition (Boston: Pearson Education, 2012) E-Book (diakses 15 Mei 2018)
- Choiriyah, Ngismatul. "Manajemen Sumber Daya Anggaran Keuangan Pendidikan", *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 8, No. 1 (2014): 90
- Creswell, John W.. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, 4th Ed.. E-Book (Boston: Pearson Education, 2012) E-Book (diakses 16 Mei 2018)
- Creswell, John W.. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Direktorat Pembinaan SMA. *Juknis Penyusunan Rencana Kerja SMA*. (Jakarta: Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud, 2010). Ebook (Diakses pada 26 Oktober 2018)
- , *Panduan Penyusunan RKAS Sekolah Menengah Atas*. (Jakarta: Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud, 2015). Ebook (Diakses pada 26 Oktober 2018)
- Echols, John dan Sadily, Hasan. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2015.
- Fatah, Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda

Karya, 2012.

----- . *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Gandaria, Robertho Yanflor. “Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Dalam Mewujudkan Good Governance And Clean Government Di Pemerintah Daerah”. *Jurnal Lex Administratum* 3, No. 6 (2015): 7.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jilid II. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press, 2005.

Harmonika, Sri. Hadits-Hadits tentang Sumber Daya Manusia (SDM). *Jurnal At-Tadair* 1, No. 1 (2017): 7.

Helmawati. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Agama Islam*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015)

Hill, Charles W.L. and McShane, Steven L.: *Principles Of Management*. (New York: McGraw-Hill/Irwin, 2008) E-Book (diakses 15 Mei 2018)

Ismaya, Bambang. *Pengelolaan Pendidikan*. (Bandung: Refika Additama, 2015)

Jumiati, Ipah Ema. *Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. (Serang: Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, t.t)

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 056/U/2001 *Tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.

Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor: 451 Tahun 2018 Tentang: Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun 2018.

Khoerudin, Yul. “Sistem Pembiayaan Pendidikan MI Ma’arif NU 01 Petahunan Dan MI Ma’arif NU 01 Kranggan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas” Disertasi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

Kurniawan, Sugeng. “Konsep Manajemen Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadits (Studi Tentang Perencanaan)”. *Nur El-Islam*. 2, no. 2 (2015): 3.

- Machali, Imam dan Hidayat, Ara. *The Handbook of Education Management: Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2016)
- Matin. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep Dan Aplikasinya*. (Jakarta: Rajawali Press, 2014)
- Moleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015)
- Musthafa. *Manajemen Keuangan*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2017)
- Ni Ayu Krisna Dewi et,al.. “Analisis Faktor-faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Usia Pendidikan Dasar Di Kecamatan Gerokgak Tahun 2012/2013”. Online Journal *E-Journal.Undiksha*, 4, No. 1 (2014), (diakses 1 September 2018)
- Nugroho, Eko. *Sistem Informasi Manajemen: Konsep, Aplikasi dan Perkembangannya*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2010)
- Nugraha, Safri. *Laporan Akhir Tim Kompedium Bidang Hukum Pemerrintahan Yang Baik*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham RI, 2007)
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 47 Tahun 2008 Tentang: Wajib Belajar
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 48 Tahun 2008 Tentang: Pendanaan Pendidikan Pasal 59
- Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117
- Permendiknas No 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009.
- Permendiknas Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
- Putri, Afrilliana. “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukit Tinggi”. *Bahana Manajemen Pendidikan 2*. No. 1 (2014): 35
- Rachman, Maman. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. (Semarang: IKIP Semarang, 1999)

- Rusdiana. *Pengelolaan Pendidikan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2015)
- Saefullah. *Manajemen Pendidikan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2014)
- Solahudin. “Peran Strategis Madrasah Swasta Di Indonesia”. *Jurnal Kependidikan* 6. no. 1 (2018). 94
- Sugiono. *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*. (Bandung: Alabeta, 2015)
- , *Metode Penelitian Manajemen*. (Bandung: Alfabeta, 2014)
- , *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Sulistiyorini. *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Teras, 2009)
- Sunhaji. *Manajemen Madrasah*. (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2008)
- Suhardan, Dadang, at.al.. *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Sujarweni, V. Wiratna. *Manajemen Keuangan: Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, t.t)
- Supriadi, Dedi. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar Dan Menengah*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010)
- Sutabri, Tata. *Sistem Informasi Manajemen*. (Yogjakarta: Andi Offset, 2005)
- Tim Pengembang Bahan Pembelajaran Lembaga Pengembangan Dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Depdiknas. *Bahan Pembelajaran Diklat Calon Kepala Sekolah: Pengelolaan Keuangan Sekolah/Madrasah*. (Jakarta: LPPKS, 2013) E-book (diakses 30 Agustus 2018)
- , *Bahan Pembelajaran Diklat Kepala Sekolah : Penyusunan Rencana Kerja Sekolah/Madrasah*, (Jakarta: LPPKS Indonesia, 2013) E-book (diakses 25 Oktober 2018)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Tripathi, P. C. And Reddy, P. N.: *Principles Of Management*, Fifth Edition (New Delhi: Tata McGraw-Hill Education Private, 2012) E-book (diakses 9 Mei 2018)

Undang-undang Dasar 1945 pasal 28E dan pasal 31 ayat (1) dan (2). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78

Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal: 48

Undang-undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia pasal: 12 dan 60 ayat (1). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pasal 17 ayat (1).

USAID Prioritas. *Praktik Yang Baik Di Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)*. (t.t.p.: RTI International, 2013)

Uwais, Sanusi dan Rusdiana, H.A.. *Sistem Pemikiran Manajemen Pendidikan: Alternatif Memecahkan Masalah Pendidikan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2017)



IAIN PURWOKERTO